



► DANA DESA

# DD Wajib Dukung Ketahanan Pangan

**SLEMAN**—Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Sleman mencatat seluruh kalurahan masih menyesuaikan rencana penggunaan Dana Desa (DD) dengan program ketahanan pangan Pemerintah Pusat.

Andreas Yuda Pramono  
andreas.yuda@harjanjogja.com

Kewajiban penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) No.3/2025 tentang Panduan Penggunaan DD untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.

Kepala DPMK Sleman, Samsul Bakri mengatakan instansinya saat ini masih menggelar pendampingan untuk 17 kapanewon di Sleman. Dalam setiap pendampingan, DPMK mengundang lurah, ketua badan permusyawaratan kalurahan dan ulu-ulu.

"Kami mendampingi dalam perancangan penggunaan Dana Desa yang minimal 20 persen dari total DD untuk ketahanan pangan," ungkapnya saat ditemui di Rumah Dinas Bupati Sleman, Rabu (19/2).

Sebenarnya kalurahan telah ada perencanaan penggunaan dan *plotting* komposisi DD namun hal itu mesti diubah

► Bisa juga BUMDes membeli hasil pertanian dari para petani dan menjual lagi hasil tersebut.

► Penggunaan DD 20% dapat dikerjasamakan dengan petani untuk menyuplai kebutuhan MBG.

lagi karena ada Kepmendes PDT No.3/ 2025. Dalam Kepmendes PDT ini, ada aturan yang lebih spesifik dalam mengelola DD, seperti aturan yang mengharuskan badan usaha milik desa (BUMDes), BUMDes bersama (Bumdesma) serta lembaga ekonomi masyarakat di desa/kalurahan lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan.

Kempendes PDT tersebut juga mengamanatkan agar belanja DD paling rendah 20% sebagai penyertaan modal desa kepada BUMDes, Bumdesma atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah desa dan/atau musyawarah antardesa.

## Pagu Naik

"Jadi pengelola dana desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan melalui BUMKal, lembaga perekonomian desa dan tim pelaksana kegiatan [TPK]. TKP ini diperuntukkan bagi kalurahan yang belum punya bumkal," katanya.

Samsul memberi contoh wujud ketahanan pangan seperti pengelola DD dapat mendirikan *green house* untuk pembibitan dan menjual bibit-bibit tersebut. Bisa juga BUMDes membeli hasil pertanian dari para petani dan menjual lagi hasil tersebut.

Menurut dia, penggunaan DD 20% tersebut dapat dikerjasamakan dengan petani untuk menyuplai kebutuhan bahan baku makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kira-kira pencairan DD tahap I sekitar April 2025. Meski kalurahan sudah siap, tapi itu juga yang menentukan Pusat," ucapnya. Pagu DD Sleman pada tahun ini diketahui sebesar Rp127,35 miliar. Pagu ini naik sekitar Rp4 miliar dibandingkan 2024.

Panewu Mlati, Arifin, mengatakan kecamatannya telah bertemu dengan DPMK Sleman guna membahas alokasi DD 20% dan pengelolaannya beberapa hari lalu.

Pada Selasa (25/2), Arif akan bertemu dengan DPMK kembali guna membahas alokasi dan pengelolaan secara lebih teknis.

"Kalau peran kami di kapanewon, sementara ini melakukan pendampingan untuk mencari alternatif program yang bisa dilaksanakan melalui DD itu. Sementara ada masukan nanti untuk mendukung operasional dapur umum MBG. Ada juga yang akan membuat pertanian terpadu," kata Arifin.